

M. Zia Ul Islam
NPM. 2226061003

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP kali ini. Keempat perusahaan tersebut adalah, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. Keempatnya bergabung dengan Netflix, Facebook, Tiktok hingga Shopee CS yang terlebih dahulu ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN.

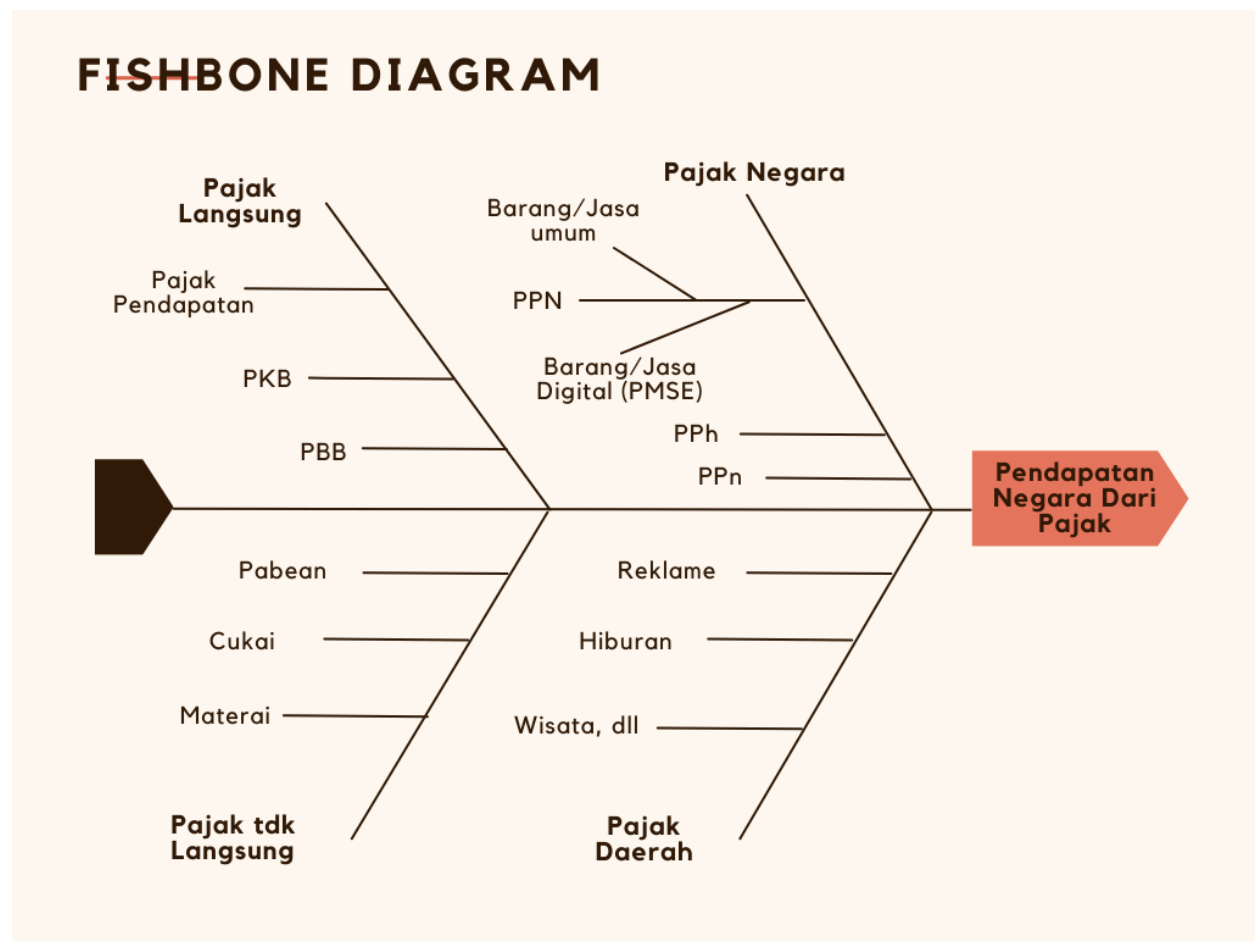
Penambahan perusahaan digital sebagai pemungut pajak, saat ini telah mencapai 149 perusahaan digital. Hal ini disebabkan semakin ramainya jual beli barang dan jasa di dunia digital yang semakin maju dan berkembang, sehingga potensi pajak pertambahan nilai dari proses transaksi yang terjadi sangat potensial untuk menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu penambahan perusahaan sebagai pemungut PPN juga akan menguntungkan bagi perusahaan digital itu sendiri sebagai pelaku usaha.

Adapun definisi operasional dari bertambahnya perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sektor pajak adalah sektor terbesar dalam penerimaan negara
2. Bahwa PPN sebagai pajak negara terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), dan Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), masih belum maksimal diperoleh dari Transaksi digital (PMSE)
4. PPN dari PMSE sangat potensial untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak
5. Wajib pajak dari PMSE adalah Platform digital dari dalam dan luar negeri

6. Kesadaran dan keinginan perusahaan digital yang mengajukan diri sebagai Pemungut PPN semakin meningkat.
7. Pengawasan terhadap transaksi digital semakin mudah dan transparan
8. Pertambahan pendapatan negara yang diperoleh dari PPN PMSE akan mempengaruhi secara positif terhadap stabilitas ekonomi bangsa.

Penjelasan definisi operasional dan pemetaan masalah dari bertambahnya perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tergambar dalam diagram Fish Bone berikut :



Dari diagram Fishbone di atas, diuraikan bahwa penerimaan PPN dari PMSE dengan bertambahnya perusahaan digital pemungut PPN akan mempengaruhi penerimaan PPN secara umum, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pajak negara, sehingga akan mempengaruhi juga pendapatan negara dari sektor pajak secara keseluruhan,

2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

Kasus A

Dari contoh kasus ini yang pertama adalah mengkaji persoalan yang ada, yakni lebih dari 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia sebagai pengguna internet yang tidak semua aplikasi/Platform digital yang diakses diperuntukkan untuk anak-anak maupun remaja. Hal ini memang menjadi suatu yang wajar, mengingat kemajuan dunia digital, teknologi dan informasi yang semakin cepat dan mudah diakses oleh siapapun, menjadi kegemaran bagi anak-anak maupun remaja untuk berselancar di dunia maya. Efek positif dari kemajuan teknologi dan informasi ini, mesti diterima sebagai suatu keniscayaan, akan tetapi efek negatif dari hal tersebut, juga akan selalu ada, tinggal bagaimana kita meminimalisir dari efek negatif tersebut agar tidak memapar pada anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet.

kita mengetahui bahwa efek negatif dari penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja cukup besar dan akan mempengaruhi anak dan remaja, baik psikologis maupun psikis, baik materi maupun immateri. Oleh karenanya, perumusan masalah dari suatu kebijakan terhadap hal tersebut mesti ditentukan secara komprehensif, mendalam dan berkesinambungan dan berbasis data, sehingga dapat diperoleh apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan.

Perumusan alternatif kebijakan dan penyusunan model kebijakan juga menjadi perhatian dalam melakukan peramalan atas masa depan kebijakan (Forecasting). Pembatasan usia dalam mengakses situs atau aplikasi tertentu bisa menjadi pilihan kebijakan dalam mengurangi efek negatif bagi anak dan remaja sebagai pengguna internet.

Selanjutnya pada tataran aksi kebijakan, dapat disusun suatu penetapan kriteria dan penilaian alternatif dalam menghasilkan suatu rumusan kebijakan, dimana salah satunya adalah mewajibkan semua Platform Digital, Situs maupun Aplikasi Digital untuk mewajibkan penyajian *End User License Agreement* (EULA) pada saat Platform digital, situs maupun aplikasi itu, dibuka, diakses maupun akan diinstall dan digunakan.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan merupakan kebijakan yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun-tahun yang lalu dalam mensikapi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Penerimaan Peserta Didik Baru, dimana pada skala lebih luas, kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor **M/2/HK.04.00/III/2023** mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Didalam kedua kebijakan tersebut (SE Menaker dan PP 15/2023) pelaksanaan pemberian THR akan berjalan secara efektif dan efisien apabila :

1. Pemberian THR yang menggunakan APBN maupun APBD dan dana Perusahaan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
2. Berpedoman pada perhitungan keuangan yang matang, serta memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah, dalam pelaksanaannya
3. dalam pemberian THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tidak hanya didasarkan pada Surat Edaran Menteri, tetapi juga agar diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, atau setidaknya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri.
4. dalam pemberian THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan juga melibatkan Dinas/Lembaga terkait ditingkat Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi

